

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keuangan negara dan pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dari peran pembangunan masing-masing daerah. Kemampuan daerah menjadi pertimbangan yang penting bagi kemajuan pertumbuhan ekonomi nasional pada umumnya. Oleh karena itu perlu penyerahan dan pengelolaan aset daerah secara efektif dan efisien. Penerimaan daerah yang optimal dapat menjadi tolok ukur suatu daerah tersebut dikatakan berhasil dalam melaksanakan otonomi daerahnya. Sejalan dengan pengolahan keuangan negara, berbagai kebijakan yang ditempuh dan diarahkan untuk meningkatkan perekonomian semakin ditingkatkan.

Demi menciptakan pembangunan nasional, pelaksanaan pembangunan harus adil dan merata. Semua itu tidak akan berjalan secara baik tanpa adanya peran pembangunan daerah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang konsisten dan berkelanjutan.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tanggal 1 Januari 2001, yang ditandai dengan dikeluarkannya UU No.22 Tahun 1999 dan diperbaharui menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004, peran pemerintah diharapkan akan terlihat nyata dalam kontribusinya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, pengelolaan

keuangan daerahnya tidak selalu bergantung pada pemerintah pusat. Hal tersebut tidak terlepas dari peran masyarakat yang turut andil dalam menggerakkan roda perekonomian daerahnya. Pemerintah daerah akan melihat sektor apa saja yang dinilai akan memberikan kontribusi dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah sehingga pada akhirnya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan diberlakukannya undang-undang otonomi daerah tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hampir seluruh kewenangan sudah berada pada pemerintahan daerah kabupaten dan kota, sehingga campur tangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah akan relatif lebih kecil (Suparmoko, 2002: 26).

Menurut Wahyudi (2010), tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin meningkat seiring dengan banyaknya kewenangan yang dilimpahkan pada pemerintah daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumen ke daerah dalam jumlah yang tidak sedikit. Dana perimbangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam mendukung otonomi daerah meskipun jumlahnya cukup memadai namun pemerintah daerah harus dituntut lebih kreatif dan inovatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya dan memberikan keleluasaan dalam membelanjakan APBD-nya. Oleh karena itu, daerah diharap mampu untuk menggali potensi-potensi sumber-sumber PAD secara maksimal namun harus tetap mengikuti undang-undang yang berlaku.

Realitas korelasi fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ditandai dengan tingginya kontrol pemerintah pusat terhadap proses pembangunan daerah. Ini nampak jelas dari rendahnya proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah dibanding besarnya subsidi dari pemerintah pusat. Indikator desentralisasi fiskal adalah perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah (Kuncoro, 2004: 8).

Menurut Kuncoro (2004), terdapat lima penyebab rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada akhirnya mengakibatkan ketergantungan terhadap pemerintah pusat antara lain:

1. Kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah
2. Tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan
3. Kendati pajak daerah cukup beragam, ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan
4. Adanya kekhawatiran apabila daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi akan menyebabkan terjadinya disintegrasi dan separatisme
5. Kelemahan dalam pemberian subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah

Keadaan ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat apabila terus berlangsung, pertumbuhan daerah yang pesat akan menyebabkan meningkatnya beban anggaran pada pemerintah pusat. Desentralisasi diartikan sebagai pengembangan otonomi daerah, sedangkan dekosentrasi

diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom (Suparmoko, 2002: 19).

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang perlu diperhatikan peningkatannya. Peran pemerintah daerah dalam memberikan fasilitas dan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat. Masyarakat yang puas dalam menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah daerah maka kesadaran mereka dalam membayar pajak atas penggunaan fasilitas tersebut akan meningkat.

Masyarakat sebenarnya tidak akan keberatan dalam hal membayar pungutan apapun asalkan hasil pungutan tersebut digunakan untuk kemakmuran masyarakat. Hendaknya tetap diingat bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak sepenuhnya disediakan pemerintah daerah, kecuali untuk kegiatan-kegiatan yang manfaatnya lebih bersifat lokal (Suparmoko, 2002: 10).

Setiap daerah di Indonesia melalui Dinas Pendapatan Daerah memiliki kewenangan untuk memungut pajak atas semua objek pajak di daerahnya. Pemerintah pusat memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing. Demikian juga dengan Kabupaten Wonogiri, pada era otonomi daerah pembangunan daerahnya mulai mengalami perkembangan yang signifikan. Begitu juga dengan berbagai sektor yang mengalami perkembangan, seperti sektor pariwisata dan industri. Dengan berlakunya perdagangan bebas, maka persaingan mengembangkan strategi promosi pada berbagai sektor tersebut juga

mengalami persaingan yang ketat. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan atau industri-industri berusaha untuk menarik perhatian konsumen dengan cara melakukan promosi-promosi baik untuk memperkenalkan produk maupun memasarkan produknya.

Menurut data BPS sampai tahun 2011 terdapat 4 objek wisata yang dikelola untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Keempat lokasi tersebut adalah Objek Wisata Gajah Mungkur (Sendang), Kayangan Tirtomoyo, Goa Putri Kencono Pracimantoro, dan Sendang Siwani Wonogiri. Dari objek wisata yang dikelola tersebut pada tahun 2011 jumlah pengunjung sebanyak 438.049 orang.

Jumlah pengunjung wisata tersebut menjadi sumber pendapatan bagi daerah dan sumber pendapatan bagi masyarakat sekitar untuk membuka usaha restoran dan hotel atau penginapan di sekitar tempat wisata. Media reklame (periklanan) sangat dibutuhkan dalam memperkenalkan usaha mereka kepada wisatawan domestik maupun mancanegara.

Sektor perdagangan dan industri untuk tahun 2011 didominasi oleh perusahaan kecil sebanyak 1.002 usaha dari 1.091 usaha. Sedangkan untuk pengguna jasa industri listrik di Kabupaten Wonogiri yang tercatat di PT PLN Cabang Wonogiri maupun Jatisrono sebanyak 212.180 dari total pemakaian 208.352.661 kwh.

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten Wonogiri giat menata kegiatan ekonomi dan bisnis dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang dimiliki.

Pembangunan Pasar Induk Wonogiri sebagai bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Wonogiri untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat wonogiri. Potensi unggulan Kabupaten Wonogiri sebagai andalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan juga peluang bagi investor untuk menanamkan modal dalam meningkatkan potensi unggulan seperti: Kacang mete dengan luas lahan 17.458 hektar dan jumlah produksi 1.049,5 ton/ tahun, tepung tapioka dengan luas lahan perkebunan ketela pohon 70.681 hektar dan jumlah produksi 30,25 ton/hari, Janggolan atau cincau dengan luas lahan rumput cincau 1.000 hektar dan jumlah produksi 6.000 ton/tahun, sangkar burung dengan jumlah produksi 100 buah/bulan, industri karoseri sebanyak 30 unit/bulan, jamu tradisional, lukis kaca, tatah sungging, mebelair, batu permata, batik tulis dan cap, ikan air tawar (karamba).

Tersedianya sumber daya manusia yang berperan aktif, kreatif, dan inovatif dalam meningkatkan lapangan usaha bagi penduduk sekitar akan mengurangi angka pengangguran sekaligus menjadi peluang bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerahnya melalui pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah.

Dari banyaknya potensi unggulan yang dimiliki Kabupaten Wonogiri dapat membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah, sehingga mampu mengoptimalkan penerimaan pajak daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Sesuai dengan latar belakang tersebut mendorong dilakukannya penelitian mengenai faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Daerah yang dituangkan dalam penelitian yang

berjudul: **Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Wonogiri dalam Era Desentralisasi Fiskal.**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah jumlah pengunjung wisata berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Wonogiri pada tahun 2006-2011?
2. Apakah jumlah industri berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Wonogiri pada tahun 2006-2011?
3. Apakah daya listrik tersambung berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Wonogiri pada tahun 2006-2011?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh jumlah pengunjung wisata terhadap penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Wonogiri.
2. Menganalisis pengaruh jumlah industri terhadap penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Wonogiri.
3. Menganalisis pengaruh daya listrik tersambung terhadap penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Wonogiri.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini secara terperinci adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan peneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah Kabupaten Wonogiri dalam era desentralisasi fiskal.

2. Bagi masyarakat, memberikan informasi mengenai pajak daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di Kabupaten Wonogiri.
3. Bagi pemerintah, diharapkan mampu menjadi acuan bagi pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri dalam membuat kebijakan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah Kabupaten Wonogiri.
4. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Penulisan

Bab I : PENDAHULUAN. Unsur-unsur yang dimuat dalam bab ini antara lain: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : LANDASAN TEORI. Bab ini berisi mengenai pendekatan teori sebagai pendekatan permasalahan yang akan diteliti. Terdapat juga pendokumentasian hasil penelitian-penelitian terdahulu yang meneliti dengan objek yang sama, sehingga mampu menemukan kelemahan dari penelitian terdahulu. Dari hal tersebut diharap mampu menjelaskan letak hubungan dan perbedaannya.

Bab III : METODE PENELITIAN. Dalam bab ini berisi tentang metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini dan data-data yang digunakan beserta sumber data.

Bab IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN. Bab ini merupakan uraian atau gambaran mengenai data yang akan diteliti. Semua temuan-temuan hasil analisis data akan diuraikan juga dalam bab ini.

Bab V : PENUTUP. Bab ini berisi tentang jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari rumusan masalah sehingga mampu ditarik suatu kesimpulan dari hasil analisis data beserta saran dari peneliti untuk dapat dikembangkan lagi pada penelitian selanjutnya.